

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

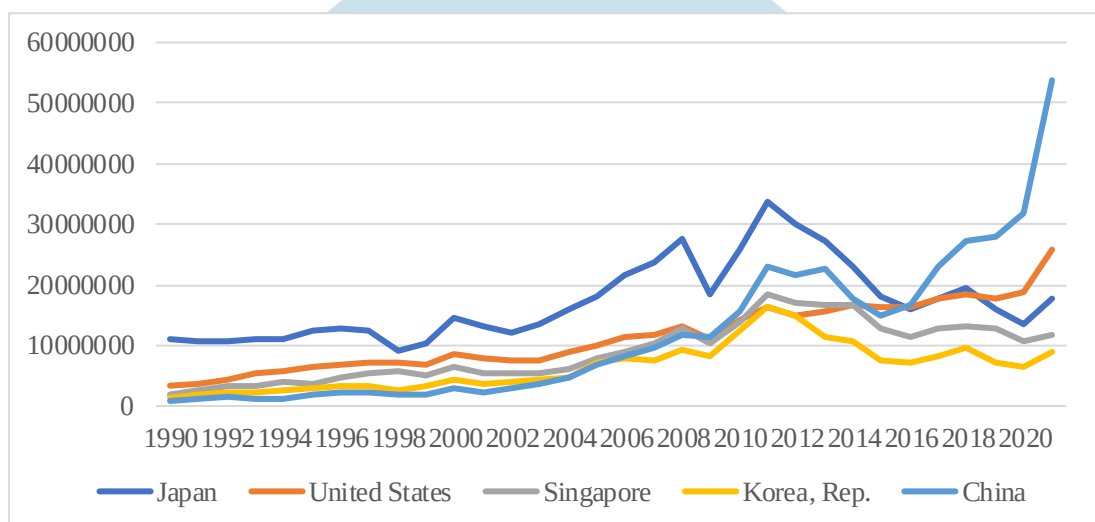
Perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, terutama bagi yang terlibat dalam hubungan ekonomi global. Perdagangan internasional tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan cadangan devisa, tetapi juga mendorong masuknya aliran modal serta membuka lebih banyak kesempatan kerja (Fitriani, 2019). Melalui akses ke pasar global, produk-produk dalam negeri dapat dipasarkan secara luas hingga ke luar negeri melalui ekspor, sehingga perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak perdagangan internasional terhadap ekonomi sangat dipengaruhi oleh globalisasi yang membuka peluang melalui penurunan hambatan tarif dan non-tarif serta memperluas akses pasar global bagi produk domestik. Salah satu cara negara terlibat dalam perdagangan internasional adalah melalui ekspor (Apridar, 2012). Ekspor berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena memperluas pasar bagi produk domestik dan meningkatkan devisa sekaligus memungkinkan pemanfaatan produksi secara efisien.

Negara eksportir umumnya memiliki keunggulan kompetitif dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, didukung oleh keahlian industri dan tenaga kerja yang berkualitas (Perdana, 2010). Keunggulan ini memungkinkan negara tersebut untuk memproduksi barang berkualitas dengan biaya lebih rendah, sehingga dapat bersaing di pasar global. Di samping itu, negara-negara tersebut umumnya

mengadopsi teknologi serta proses industrialisasi yang efisien, sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja yang dimiliki. Ketika nilai ekspor suatu negara lebih tinggi dibandingkan impornya, kondisi ini menunjukkan kekuatan ekonomi negara tersebut dalam konteks perdagangan internasional. Surplus perdagangan menunjukkan bahwa negara mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri sambil menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi domestik. Sebaliknya defisit perdagangan di mana impor melebihi ekspor mengindikasikan ketergantungan pada produk luar negeri dan lemahnya daya saing industri domestik yang dalam jangka panjang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan negara.

Kegiatan ekspor telah menjadi fokus utama Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sejak pertengahan tahun 1970-an, ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam berbagai kerjasama ekonomi internasional seperti APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) dan ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*). Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini menunjukkan keseriusan negara dalam meningkatkan keterlibatan di perdagangan global dan memperkuat akses ke pasar-pasar baru dan meningkatkan daya saing produk ekspornya terutama di kawasan Asia-Pasifik. Partisipasi tersebut mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di kancah perdagangan global serta memperluas akses terhadap pasar-pasar baru, khususnya di wilayah Asia-Pasifik. Selain menjadi anggota APEC dan ASEAN, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam sejumlah perjanjian perdagangan global seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *General Agreement on Tariffs*

and Trade (GATT), yang turut memperluas peluang ekspor ke pasar internasional. Namun, agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, Indonesia perlu terus meningkatkan mutu produk serta efisiensi dalam proses produksi guna mempertahankan daya saing di pasar global. Kinerja ekspor yang solid akan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah persaingan perdagangan global yang dinamis.



Sumber: *World Integrated Trade Solution* (2022), diolah

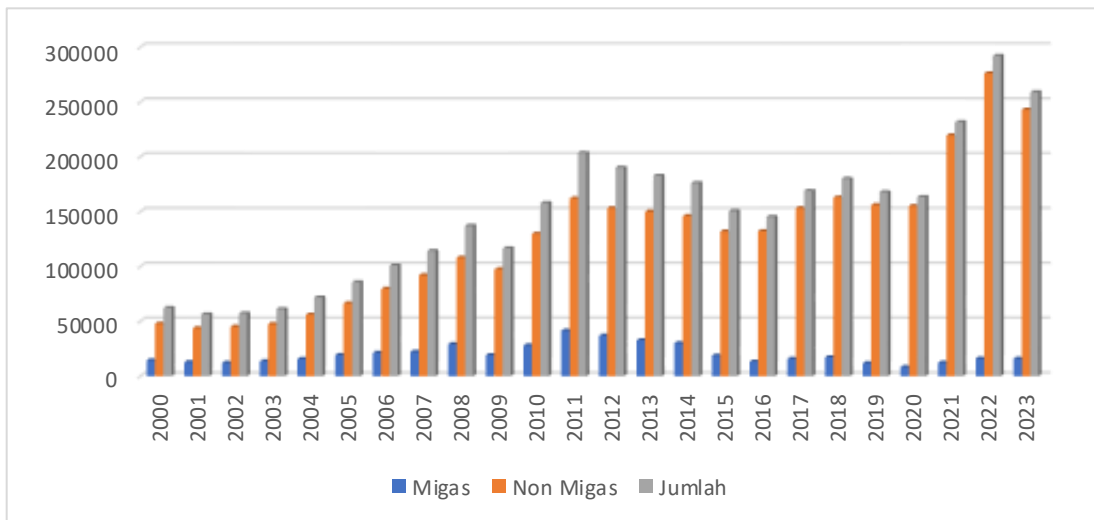
Gambar 1.1. Nilai Ekspor Indonesia Ke Negara Tujuan Tahun 1990-2021 (Juta US\$)

Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara mitra dagang utama, terutama China yang mengalami lonjakan signifikan sejak 2008 dan meningkat tajam pada 2015 tidak seperti peningkatan ekspor ke negara lain yang meningkat secara bertahap. Peningkatan ekspor yang signifikan ke negara China dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit, serta penguatan hubungan melalui perjanjian perdagangan seperti *ASEAN-China Free Trade Agreement*

(ACFTA). China telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, terutama di sektor komoditas energi dan pertanian, seiring dengan kebijakan ekonomi yang mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia, Suryana (2020). Tingkat keterbukaan ekonomi yang sangat tinggi dari negara-negara ini terhadap perdagangan internasional, tercermin dalam rasio perdagangan (ekspor dan impor) terhadap PDB mereka, telah memudahkan masuknya komoditas ekspor Indonesia ke pasar domestik mereka.

Ekspor Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama yaitu minyak dan gas (migas) serta non-migas. Sektor migas yang meliputi minyak mentah dan produk gas berperan penting dalam menyuplai pendapatan devisa besar bagi negara, sementara ekspor non-migas yang mencakup produk pertanian, manufaktur dan barang konsumsi semakin berkembang berkat diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing. Kedua sektor tersebut memiliki peran yang saling melengkapi, di mana sektor migas berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, sementara sektor non-migas memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor migas dan nonmigas setiap tahunnya mengalami fluktuasi dapat dilihat pada Gambar 1.2, di mana penurunan nilai ekspor terjadi selama periode 2011-2016, meskipun berat ekspor meningkat dengan puncaknya mencapai 700 juta ton atau 16,64 persen lebih tinggi pada tahun 2013. Rata-rata peningkatan nilai ekspor antara 2000 hingga 2022 menunjukkan sektor non-migas tumbuh sebesar 9,08 persen, sedangkan migas hanya 4,81 persen. Pergeseran ini mencerminkan pergeseran peran ekspor dari migas yang dominan pada tahun 1980-an menjadi non-

migas yang lebih berkontribusi saat ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan global, diversifikasi ekonomi dan penurunan cadangan migas.

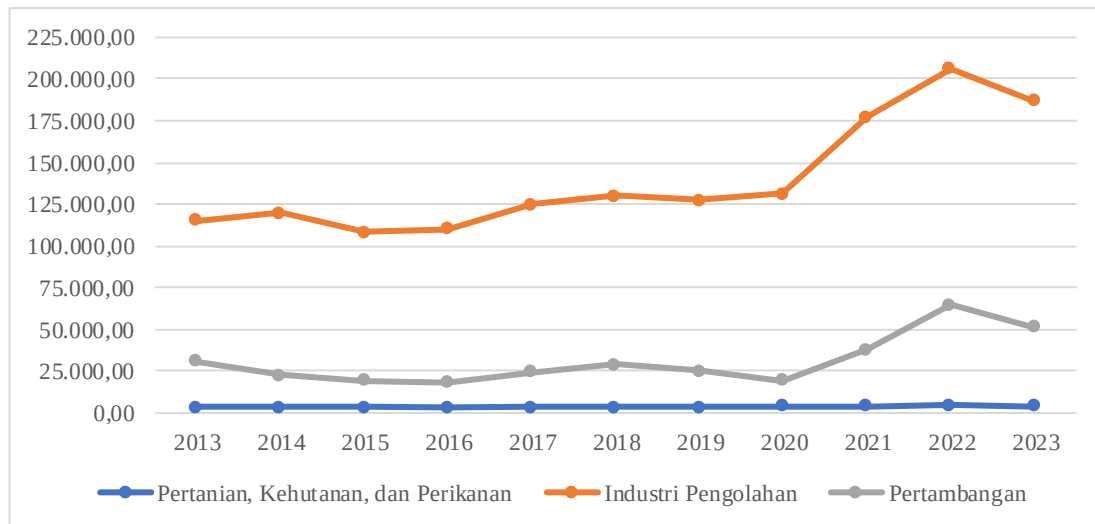


Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Gambar 1.2. Nilai Ekspor Migas - Non-Migas Indonesia Tahun 2000 - 2023 (Juta US\$)

Peranan ekspor non-migas menjadi semakin penting seiring dengan berkurangnya kontribusi ekspor migas, dengan 310 jenis komoditas yang dikelompokkan dalam kategori pertanian, industri pengolahan dan pertambangan. Gambar 1.3 menggambarkan perkembangan ekspor non-migas Indonesia pada periode 2019 hingga 2022 yang memperlihatkan dinamika signifikan, terutama pada sektor pertambangan yang mengalami lonjakan sebesar 92,14% setelah sebelumnya sempat menurun. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemulihan sektor ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan di pasar global. Di sisi lain, sektor industri pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan capaian sebesar 35,18% pada tahun 2021, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan mengalami pertumbuhan yang relatif stabil sebesar 15,4% pada tahun 2022.

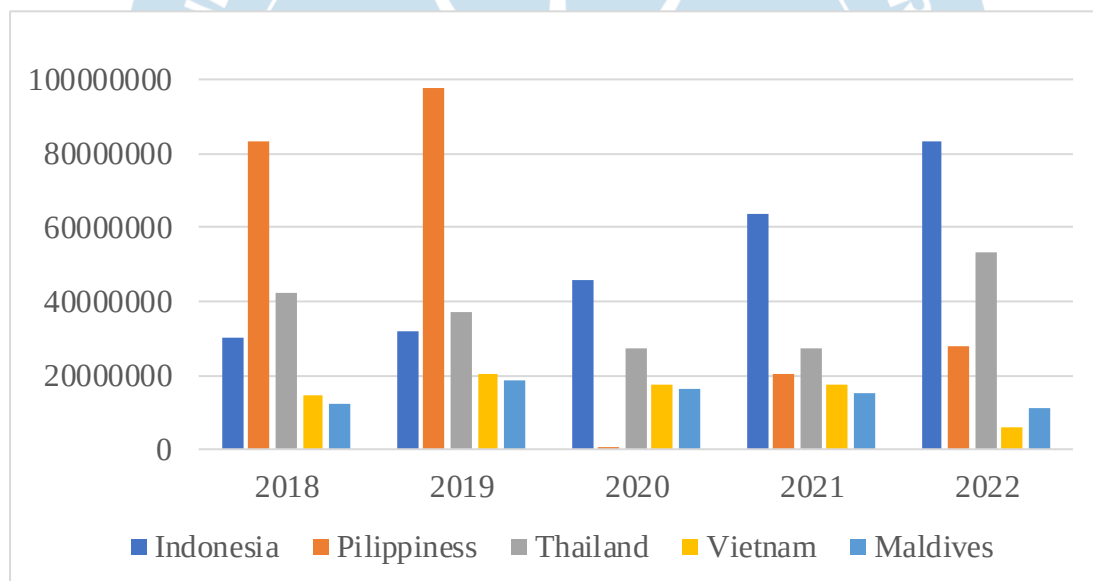


Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

Gambar 1.3. Nilai FOB Ekspor Non-Migas Indonesia Berdasarkan Sektor Tahun 2013 – 2023 (Juta US\$)

Selama 10 tahun, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap ekspor non-migas tergolong kecil, dengan rata-rata hanya 2,28 persen dari total ekspor, namun sektor perikanan menunjukkan potensi yang menjanjikan, terutama karena Indonesia menduduki peringkat kedua setelah China sebagai produsen produk perikanan terbesar. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini meningkat signifikan, didorong oleh tingginya permintaan global terhadap komoditas seperti ikan, udang dan produk perikanan lainnya. Tujuan utama ekspor perikanan Indonesia adalah Jepang dan Amerika Serikat. Negara lainnya adalah Singapura, Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, Australia, Hongkong, China, Italia, Saudi Arabia dan negara lainnya. Salah satu komoditas laut yang penting bagi ekonomi Indonesia adalah ikan tuna karena nilai ekonominya yang tinggi menjadikannya sumber devisa

kedua setelah udang. Indonesia adalah produsen ikan tuna terbesar di dunia. Berdasarkan data FAO (2020), total tangkapan tuna dan spesies serupa mencapai 7,8 juta metrik ton di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, Indonesia menyuplai 16% dari total produksi tuna global, dengan volume mencapai 1,24 juta ton (KKP 2020). Komoditas ekspor tuna Indonesia mencakup lima jenis utama, yakni *yellowfin*, *albacore*, *bigeye*, *bluefin* dan *southern bluefin*. Ekspor dilakukan dalam berbagai bentuk penyajian, antara lain tuna segar (beku), tuna utuh segar (*fresh whole*), tuna beku utuh (*frozen whole*), serta produk olahan dalam bentuk kalengan (*canned tuna*). Jenis produk yang diekspor mencerminkan variasi cara pengolahan dan penyajian tuna yang dapat memenuhi permintaan pasar yang beragam.



Sumber: *World Integrated Trade Solution* (2023), diolah

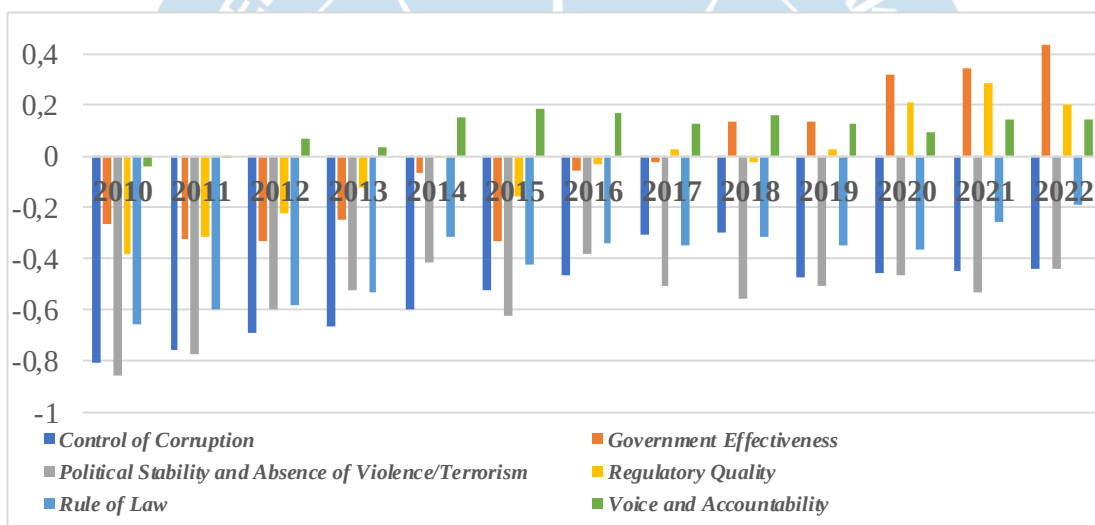
Gambar 1.4. Lima Negara Eksportir Tuna Sirip Kuning (*Yellowfin*) Terbesar Tahun 2018 - 2022 (US\$)

Nilai ekspor ikan tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia dari 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Pada 2018,

ekspor mencapai 30,34 juta US\$, kemudian terus naik hingga menyentuh 82,99 juta US\$ pada 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya permintaan global terutama dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Selain itu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik turut mendukung peningkatan hasil tangkapan dan ketersediaan tuna sirip kuning. Dalam konteks ini kualitas regulasi pemerintah menjadi krusial karena regulasi yang baik dapat mendukung prinsip pasar bebas dengan menciptakan aturan yang jelas dan konsisten tanpa menghambat kompetisi. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai fondasi politik yang mendukung mekanisme pasar dengan efektif karena secara konseptual berkomitmen untuk membatasi kekuasaan suatu kelompok atas kelompok mayoritas yang menentukan kebijakan ekonomi dan politik, termasuk regulasi yang memengaruhi perdagangan dan pasar. Kualitas lembaga di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI), menunjukkan bahwa kelemahan dalam regulasi dan institusi dapat mempengaruhi efektivitas pasar bebas.

Menurut data dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang diterbitkan oleh Bank Dunia sejak tahun 1996, kualitas tata kelola lembaga di dunia diukur melalui enam dimensi utama, yaitu *Voice and Accountability*, *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law* dan *Control of Corruption*. Indikator seperti *Regulatory Quality* dan *Control of Corruption* menggambarkan seberapa baik lembaga di suatu negara mampu menciptakan dan menegakkan regulasi yang mendukung persaingan yang adil serta mengurangi distorsi pasar. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan

efisiensi ekonomi negara. Beberapa penelitian di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati, S. (2020) dan Wibisono, A. (2018) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola ini berperan penting dalam mempengaruhi daya saing ekonomi serta meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kelemahan dalam dimensi-dimensi tata kelola ini dapat menghambat terciptanya lingkungan pasar yang kompetitif dan transparan, yang merupakan prasyarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan daya saing internasional. Berikut merupakan Enam dimensi kualitas lembaga di Indonesia.

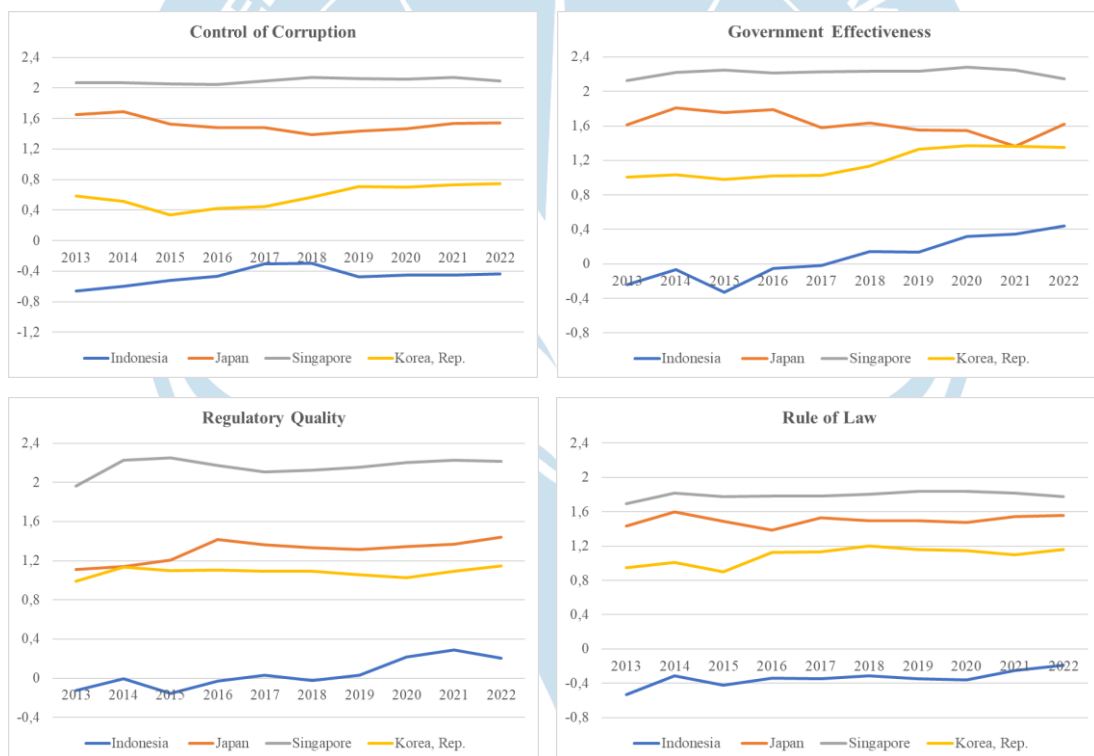


Sumber: World Bank: World Government indicator (2023), diolah

Gambar 1.5. Enam Dimensi Kualitas Lembaga di Indonesia Tahun 2010 – 2022 (Indeks)

Selama periode 2010 hingga 2022, *Worldwide Governance Indicators* (WGI) menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam dimensi *Government Effectiveness* sejak 2018 dan *Voice and Accountability* sejak 2012, yang mencerminkan perbaikan dalam efisiensi pemerintahan dan kebebasan suara.

Mayoritas kualitas lembaga di Indonesia masih berada dalam kategori buruk yang terlihat dari nilai negatif pada *Control of Corruption*, *Political Stability* dan *Rule of Law* menandakan kelemahan dalam pengendalian korupsi, stabilitas politik, serta penegakan hukum. Meskipun semua komponen tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, tantangan dalam aspek-aspek tersebut tetap dapat berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gambar 1.6 menunjukkan kualitas lembaga dari empat dimensi kualitas yang terkait dengan perdagangan yaitu *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality* dan *Rule of Law*.



Sumber: World Bank: World Government indicator (2023), diolah

Gambar 1.6. Empat Dimensi Kualitas Lembaga Yang Terkait Dengan Perdagangan Internasional Negara-Negara Pengekspor Utama ASEAN Tahun 2013 – 2022 (Indeks)

Berdasarkan empat dimensi tata kelola pemerintahan yaitu *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality* dan *Rule of Law* pada periode 2013 hingga 2022, Jepang, Singapura dan Korea Selatan secara konsisten menunjukkan skor yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Indonesia tercatat memiliki skor yang rendah atau negatif pada dimensi *Control of Corruption*, *Regulatory Quality* dan *Rule of Law*. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada dimensi *Government Effectiveness*, capaian tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan ketiga negara tersebut sepanjang periode yang sama. Masalah regulasi dan penegakan hukum di Indonesia dianggap kurang matang dalam hal kepastian hukum dan konsistensi kebijakan yang mencerminkan rendahnya nilai *Regulatory Quality* dan *Rule of Law*. Kasus ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang buruk dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan mitra dagang, sehingga berdampak negatif pada ekspor dan posisi Indonesia di pasar global.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam sektor ekspor tuna sirip kuning. Namun, dari sisi implementasi kebijakan di sektor perikanan, Indonesia masih tertinggal dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta regulasi yang mendukung peningkatan ekspor secara berkelanjutan. Masalah seperti birokrasi yang rumit, rendahnya penggunaan teknologi dalam pemantauan hasil tangkapan, serta regulasi yang belum mendukung penuh ekspor tuna menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam untuk menganalisis kualitas tata kelola pemerintah terhadap ekspor komoditas tuna sirip

kuning (*yellowfin*), guna meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di pasar internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Government Effectiveness* negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 - 2023?
2. Bagaimana pengaruh *Rule of Law* negara tujuan terhadap nilai ekspor produk produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 - 2023?
3. Bagaimana pengaruh GDP per kapita negara tujuan terhadap nilai ekspor produk produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 - 2023?
4. Bagaimana pengaruh Populasi negara tujuan terhadap nilai ekspor produk produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 - 2023?
5. Bagaimana pengaruh Tarif Impor negara tujuan terhadap nilai ekspor produk produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 - 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Government Effectiveness* negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Rule of Law* negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GDP per kapita negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Populasi negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif Impor negara tujuan terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan ekspor tuna sirip kuning (*yellowfin*), dengan fokus pada transparansi, efisiensi birokrasi, serta regulasi yang mendukung keberlanjutan dan kualitas produk perikanan.

2. penelitian ini akan membantu pembaca memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekspor Indonesia khususnya dalam industri perikanan, sehingga meningkatkan pengetahuan umum tentang hubungan antara tata kelola pemerintah dengan ekspor.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk studi-studi berikutnya, serta memberikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti yang melaksanakan penelitian ini.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Diduga variabel *Government Effectiveness* memiliki pengaruh positif terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
2. Diduga variabel *Rule of Law* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
3. Diduga variabel GDP per kapita riil memiliki pengaruh positif terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.
4. Diduga variabel Populasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.

5. Diduga variabel Tarif Impor memiliki pengaruh negatif terhadap nilai ekspor produk tuna sirip kuning (*yellowfin*) Indonesia ke delapan negara tujuan pada tahun 2018 – 2023.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bagian yang disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran umum mengenai alur dan proses penelitian, diantaranya.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I dalam penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II membahas landasan teori serta penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini mencakup data dan sumber data yang digunakan. teknik analisis data. metode analisis data. serta tahapan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV menyajikan hasil penelitian termasuk hasil regresi dan analisis hubungan antara variabel dependen dan independen, yang diperoleh melalui tahapan analisis data menggunakan model dan alat analisis yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

BAB V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait termasuk pemerintah dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai topik ini.

